

# KONFLIK ELITE DAN PEREBUTAN OTORITAS: PERIODE AKHIR KERAJAAN BONE, 1946-1951<sup>1</sup>

## *ELITE CONFLICT AND STRUGGLING AUTHORITY: FINAL PERIOD OF BONE KINGDOM, 1946—1951*

**Subarman**

SMK Negeri 2 Watampone

Jalan Sungai Musi, Watampone Kabupaten Bone

Pos-el: [subarmansalim@gmail.com](mailto:subarmansalim@gmail.com)

Diterima: 19 Juli 2018; Direvisi: 27 September 2018; Disetujui: 30 November 2018

### **ABSTRACT**

*This study revealed the local conflicts and socio-political conditions that occurred in the territory of Bone Kingdom at the beginning of independence. This topic has an urgency for the discourse of state concept and the struggling authority that colors the history of Bone territory. This study uses historical methods through four stages, namely: heuristics, interpretation, criticism, and historiography. The study result indicates that the Bone Kingdom in the last period experienced a vulnerable period due to the struggling authority, either involving NICA, extremist groups, the pro-republic and federalists, or presenter of internal conflicts in the palace. La Pabbenteng and Andi Mappanyukki were two elites who had own influences in the Kingdom of Bone. They were involved in intrigue which subsequently led to partiality towards the political situation of the revolutionary period, namely the battle of republican state concept against the federalists. Eventhough the situation was vulnerable with the rampant theft and robbery, the royal government was still running well administratively.*

**Keywords:** elite conflict, struggling authority, the Kingdom of Bone.

### **ABSTRAK**

Studi ini mengungkap tentang konflik lokal dan kondisi sosial-politik yang terjadi di wilayah Kerajaan Bone pada awal kemerdekaan. Topik ini memiliki urgensi tentang diskursus konsep negara dan perebutan otoritas yang mewarnai perjalanan sejarah daerah Bone. Kajian ini menggunakan metode sejarah melalui empat tahapan, yakni: heuristik, interpretasi, kritik, dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kerajaan Bone pada periode akhir mengalami masa rentan karena adanya perebutan otoritas, baik yang melibatkan NICA, kelompok ekstremis, prorepublik dan federalis, maupun yang menyajikan konflik internal bangsawan istana. La Pabbenteng dan Andi Mappanyukki adalah dua elite yang masing-masing memiliki pengaruh di Kerajaan Bone. Mereka terlibat intrik yang selanjutnya menggiring keberpihakan terhadap situasi politik masa revolusi, yaitu pertarungan konsep negara republik melawan federalis. Meskipun situasi keamanan rentan dengan maraknya pencurian dan perampokan, pemerintahan kerajaan secara administratif tetap berjalan.

**Kata Kunci:** konflik elite, perebutan otoritas, Kerajaan Bone.

---

<sup>1</sup>Makalah untuk dipresentasikan pada kegiatan Lawatan Sejarah Daerah oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sulawesi Selatan 29 Maret – 1 April 2018 di Enrekang

**PENDAHULUAN**

Selalu menjadi kajian menarik ketika menulis revolusi kemerdekaan. Bukan hanya spirit heroisme yang menyertainya, tetapi topik revolusi Indonesia adalah periode kompleks yang mustahil bisa digambarkan secara utuh. Tarik menarik kepentingan regionalisme dengan sentralisme negara adalah tema besar yang kerap hadir pada setiap pembahasan tentang pertarungan konsep federalis berhadapan dengan republiken (Abdullah, 2006:2-28). Pemerintahan yang baru terbentuk masih jauh dari status menguasai keadaan, sebagai implikasi dari proses rehabilitasi sosial juga politik yang masih berlangsung. Sementara, pemerintah-pemerintah daerah larut dalam krisis lokal, yang bahkan tak banyak diketahui oleh pemerintah pusat di Jakarta (Anderson, 2018: 195-196).

Jika ditelusuri lebih dalam, konflik di daerah lebih kompleks lagi. Sebagaimana Sulawesi yang tumbuh dari tradisi feodalistik kerajaan, intrik politik di masa revolusi, jelas tidak homogen. Bahkan hingga satu dekade setelah proklamasi, isu pemisahan daerah dan pembentukan daerah baru (kabupaten dan provinsi) masih mengganggu pemerintahan provinsi. Klinken bahkan menyimpulkan bahwa provinsi menjadi tatanan administratif yang memungkinkan negara merasuk lebih dalam hingga ke pedalaman. Kenyataan yang kontras jika melihat sebuah daerah baru lalu tumbuh menjadi identitas (Klinken, 2011:161).

Kerajaan Bone sebagai poros imperium Bugis juga mengindikasikan heterogenitas konflik. Tak bisa dipungkiri, bangsawan tradisional masih memiliki bargaining kuat saat negara baru saja mendeklarasikan kemerdekaan. Di Bone, berlangsung pertemuan antara penguasa pribumi di daerah Bone, Wajo, Soppeng, Luwu, Sinjai dan Bulukumba yang menyiratkan upaya penciptaan stabilitas sosial. Bahkan, pada pertemuan tersebut, dikemukakan pernyataan bersedia bekerja sama dengan NICA asalkan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terganggu (Asba, 2008:5).

Saat di Jakarta, proklamasi dikumandangkan oleh duet Soekarno-Hatta, menandai awal berdirinya sebuah negara baru, tetapi di daerah, sistem kerajaan masih berjalan. Tampaknya, integrasi nasional masih jauh, pemimpin-pemimpin lokal masih memegang supremasi. Agenda nasional tak bisa langsung menyesuaikan kondisi daerah, bahkan proklamasi belum menjadi wacana dominan. Di Bone, setahun setelah revolusi, raja baru justru dilantik (September 1946).

Sementara di Sulawesi, kontestasi kuasa masih berlangsung sengit dan intens. Kelompok bangsawan lokal, pemimpin militer yang terbelah dua, pergerakan bandit, dan kedatangan NICA, menunjukkan pertarungan tidak hanya bermuara dari dikotomi kolonial-nasionalis, bahkan itu terlalu sederhana. Konflik rumit itu akhirnya memunculkan sebuah kelompok lain yang terafiliasi ke dalam pro-federalis. Kelompok terakhir ini terkonsolidasi dalam sebuah konsep negara mengusung konsep federal Negara Indonesia Timur (NIT), konsep negara yang jelas berbeda dengan yang telah terlebih dahulu diproklamirkan di Jakarta. Meski demikian, keberadaan NIT tak mampu meredakan ketegangan, alih-alih menyudahi konflik. NIT justru menjadi perebutan panggung politik elite lokal.

Memang, NIT bukan sekadar gagasan. Ia menjadi bagian dari perjalanan panjang Indonesia dalam menemukan bentuk terbaiknya. Resikonya, pemerintahan yang baru diproklamirkan, harus berhadapan dengan dua wajah musuh: rekolonisasi Belanda dan ancaman disintegrasi. Karenanya, nuansa konflik politik mengenai konsep bernegara tak pernah mereda.

Selain tentang konsep bernegara, topik revolusi seringkali dilihat sebagai sejarah yang ‘telah selesai’<sup>1</sup>, terutama karena periode itu mencakup peristiwa proklamasi, titik tonggak berdirinya negara Indonesia. Ketika KITLV merilis rencana riset tentang “kekerasan yang dilakukan pihak Belanda selama masa ‘bersiap’

<sup>1</sup>Topik revolusi Indonesia didominasi oleh tema perang dekolonisasi (rekolonisasi) yang populer dengan slogan ‘merdeka atau mati’.

1945-1949”<sup>2</sup>, seketika menuai kritikan, bukan hanya dari segelintir kelompok di negeri Belanda, proyek itu juga direspon beragam di tanah air, tak sedikit yang mencibirnya sebagai upaya halus menutupi rangkaian kekerasan yang pernah dilakukan oleh tentara kolonial Belanda. Namun, Direktur KITLV, Gert Oostindie, tetap kukuh, ia berkeyakinan bahwa, di era serba terbuka seperti saat ini, penulisan sejarah yang lebih objektif, bukan hanya dibutuhkan, tetapi juga penting bagi keberlangsungan hubungan manusia, dan juga bagi masa depan negara-bangsa.

Setelah menerbitkan “Tentara Hindia Belanda” (2017), Oostindie bisa dikatakan pelopor bagi para sejarawan Belanda yang ingin menyajikan sejarah Hindia Belanda dalam perspektif berbeda. Ia mengumpulkan dokumen-dokumen pribadi (*ego document*) dari sejumlah veteran Belanda, surat-surat resmi, data jumlah kematian, koran-koran, lembaran arsip negara, yang tentu saja nyaris mustahil sumber itu ditemukan di Indonesia.

Oostindie berhasil membuka perspektif periode revolusi yang selama ini cenderung terperangkap ke dalam narasi besar ‘perang dekolonisasi’. Bahkan, banyak di antara penulis Indonesia yang mengabaikan peristiwa sehari-hari, demi menghadirkan tokoh-tokoh yang dianggap berperan penting dalam periode revolusi, misalnya Najamuddin Daeng Malewa dan La Pabbenteng di kubu NIT dan Sultan Daeng Raja bersama Andi Mappanyukki dan Ratulangi, di kubu nasionalis-republiken. Memang, keberadaan dua kelompok itu tak bisa ditampik, akan tetapi, kelompok lainnya, juga subkelompok yang tak berafiliasi, turut berkontribusi menghadirkan kekacauan.

Kadangkala kita merasakan ironi, membaca sejarah bangsa yang terjebak ke dalam ego-sentris. Sebuah perspektif atau telah

menjadi paradigma dalam tradisi penulisan, bahkan menjadi tren yang merasuk ke dalam ranah metodologis. Padahal, ego-sentris lebih sering mengurung kita ke dalam ruang-ruang ekstrem yang melahirkan kebencian. Memang, sejarawan tidak perlu menjadi pahlawan demi sebuah tulisan. Sebagaimana seorang bisa menulis sejarah kolonial tanpa harus dituduh sebagai sebagai pengkhianat. Karena, pada sejarah kita belajar bersikap dan bertindak, untuk masa depan peradaban yang lebih baik.

Kita perlu melihat ulang peristiwa penting itu dengan pendekatan berbeda, demi menghadirkan konstruksi sejarah yang berimbang. Kita tidak lagi berwacana mengenai gelar pahlawan dan pengkhianat, apalagi itu cenderung terkait dengan penghargaan atau penghukuman, namun mengabaikan aspek lain yang justru lebih krusial, misalnya konflik lokal, pertentangan sub-sub kelompok, juga yang tak kalah penting adalah bagaimana menjaga stabilitas sosial. Tak bisa begitu saja revolusi di Jakarta diletakkan di daerah yang memiliki isu dan intensitas konflik yang berbeda. Apakah pihak elite Kerajaan Bone memilih bertahan dengan konsep kerajaan demi menjaga stabilitas? adalah salah satu pertanyaan yang perlu diajukan kembali. Bagaimana mereka (elite lokal) menempatkan konsep NIT sebagai bagian dari tarik-menarik kepentingan atau justru menjadi langkah taktis untuk menghadapi kubu Belanda dan Sekutu yang berambisi menancapkan kembali pemerintahan Hindia Belanda?

“Sejarah adalah rekonstruksi kritis,” kata Taufik Abdullah (Abdullah, 2016:6). Kalimat itu perlu terus didengungkan demi menjaga semangat penulisan sejarah yang kadangkala terjebak ke dalam narasi besar yang berpotensi berisi kebencian akut atau hanya berupa lembaran-lembaran transkripsi tanpa makna. Sejarah harus tetap kritis agar tidak buta atau jika tidak, ia hanya menjadi mitos belaka. Taufik Abdullah memelopori semangat menyudahi mitos 350 tahun penjajahan kolonial Belanda, bukan hanya tentang rentang waktu yang lama, tetapi fakta bahwa konflik yang terjadi di daerah

<sup>2</sup>KITLV merancang proyek riset bertepatan periode ‘bersiap’ tahun 1945-1949, melibatkan sejumlah individu dan kelompok periset, juga lembaga perguruan tinggi. Di Indonesia, mereka bekerja sama dengan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada.

masing-masing memiliki pemicu dan sejumlah implikasi, juga sangat kompleks.

Kita masih membutuhkan penjelasan yang lebih berimbang agar tidak terjebak ke dalam dikotomi pejuang-pengkhianat hanya karena revolusi di daerah tidak berjalan seirama dengan pusat. Bagaimana kerajaan Bone berhasil melewati masa rentan itu? adalah topik yang ingin ditelusuri di dalam tulisan ini. Kelompok dan subkelompok apa saja yang terlibat dalam perebutan otoritas kuasa, juga akan dipaparkan untuk menguatkan argumentasi, bahwa revolusi masih membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, lebih dari sekadar pertarungan konsep negara.

## METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan, yakni, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pengumpulan referensi diambil dari sumber tertulis, yakni khasanah arsip nasional dan daerah (Pemda Bone), buku, jurnal, makalah dan hasil riset terkait. Untuk tahapan kritik, kajian ini berusaha menemukan keselarasan dari sumber yang berbeda untuk topik yang sama. Beberapa sumber arsip memiliki validitas yang kuat sebagai peninggalan sejarah, namun tentu saja masih perlu diuji objektivitasnya. Misalnya, laporan peristiwa atau notulensi rapat, umumnya ditulis oleh orang yang memiliki kedekatan emosional dengan penguasa. Selain itu, sumber informasi tertulis lainnya masih sangat minim.

Sedangkan tahapan interpretasi, memungkinkan penulis untuk melakukan telaah lebih jauh mengenai sumber sejarah yang digunakan. Memberi makna terhadap sumber yang ditemukan, baik makna eksplisit, maupun kaitan peristiwa tertentu. Misalnya, untuk nota rapat pertemuan para raja yang diinisiasi oleh pihak Kerajaan Bone, perlu ditelusuri adalah motif para raja, dan implikasi hasil pertemuan mereka. Tahapan terakhir adalah historiografi, yakni penulisna karya sejarah.

## PEMBAHASAN

### Bone di Era Revolusi

Sebelum tahun 1959<sup>3</sup>, wilayah Kerajaan Bone masih berbentuk afdeling, sebuah wilayah administrasi warisan pemerintahan kolonial Belanda setingkat Kabupaten berstatus swapraja. *Afdeling* Bone membawahi *onderafdeling*, meliputi Soppeng dan Wajo (UU, No. 29/1959).

Pada akhir Mei 1949, penduduk Bone tercatat sebanyak 493.950 jiwa yang meliputi warga sipil keturunan Indonesia, Belanda, Arab, Tionghoa, Pakistan dan Yahudi. Setahun berselang, jumlah pada tahun 1950 menurut catatan pemerintah Swapraja Bone sebanyak 509.496 jiwa, yang tersebar di 30 distrik (setingkat kecamatan).

Selama kurun waktu 1946 hingga 1950, Kerajaan Bone di bawah pemerintahan La Pabbenteng secara administratif tetap berjalan sesuai fungsi para pemangku. Beberapa laporan kondisi sosial politik berkala ditemukan dalam lembaran arsip, juga notulensi rapat yang melibatkan para pejabat kerajaan, menunjukkan Lapabbenteng memegang kendali pemerintahan.<sup>4</sup> Kehidupan beragama sudah mulai tertata dengan baik. Terdapat 37 anggota Sjarat (Khadi) yang ditugaskan menjadi imam di Watampone dan distrik-distrik (Arsip Bone, No.953).

### Konflik Internal Pewaris Tahta

Sebelum kedatangan kembali Belanda (NICA), juga sebelum kapitulasi Jepang, konflik internal dalam istana kerajaan sudah berlangsung. Mungkin, pertentangan elite yang paling mengemuka dalam catatan sejarah adalah periode kedatangan Islam. Islam yang dibawa

<sup>3</sup>Penetapan berdasarkan RI Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, pada tanggal 4 Juli 1959

<sup>4</sup>Rapat pemerintah kerajaan Bone pada 30 November 1949, dihadiri pejabat di antaranya: Maddusila, Makkedang Tana; Sulolipu, Tomarilaleng; Patarai, Aru Matjege; Mandapi, Aru Pontjeng; Paranrengi, Aru Tibotjong; Passalo, Aru Ta'; Pasinringi, Aru Tanete Riattang dan para Salewatang. Arsip Pemda Bone, No.Reg. 924.

oleh pihak Gowa membawa implikasi politik yang tajam dan membelah elite istana.

Konflik yang terjadi pada periode islamisasi itu akhirnya melahirkan friksi di internal kerajaan, yang mengesankan kelompok konservatif berhadapan dengan kelompok progresif. Pengelompokan itu pun tidak bisa mewakili kategori pro-ismalis dengan status quo. Tentu saja, asumsi ini masih memerlukan telaah lebih dalam, mengingat periode itu tercatat dalam sejarah yang akhirnya memicu perang besar, juga pemakzulan raja. Pemakzulan raja menimpa La Tenri Ruwa Sultan Adam MatinroE ri Bantaeng, seringkali dikaitkan dengan kedatangan Islam, namun tak cukup argumentasi untuk tidak mengatakan itu adalah buah konflik elite kerajaan. La Tenri Ruwa adalah Raja Bone ke-11, dikenal memiliki pemikiran terbuka, dan tercatat sebagai elite yang pertama kali memeluk agama Islam. Dampaknya, sikap keterbukaan beliau terhadap ajaran agama Islam justru membawa perselisihan dengan para petinggi dan sebagian rakyat Bone. Sikap ini dinilai sebagai bentuk ketundukan terhadap kekuasaan Kerajaan Gowa, dan akhirnya, beliau dimakzulkan dan digantikan oleh La Tenri Palo Arung Timurung MatinroE ri Tallo.<sup>5</sup> Yang disebut terakhir, menolak ajakan masuk Islam dan memilih menyiapkan pasukan untuk menyerang Gowa (Mappangara, 2008:285).

Selanjutnya, pada periode kolonial, meski terjadi delegitimisasi pemerintahan kerajaan sekitar 25 tahun,<sup>6</sup> friksi elite istana masih terjadi, dan makin kompleks. Pada 1930, desakan untuk menghidupkan kembali pemerintahan kerajaan makin mengemuka. Pihak Belanda memenuhi desakan untuk mengembalikan *arajang* (*properti*)

<sup>5</sup>Kerajaan Bone dan Gowa sering terlibat konflik yang berakhir dengan peperangan, namun fakta menunjukkan bahwa secara tradisional keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Lihat Suriadi Mappangara, *Sulsel, Dimensi Sosial-Budaya, Untuk Pariwisata* (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI dengan Universitas Hasanuddin 2008), hlm. 285

<sup>6</sup>Sejak ditaklukkan Belanda pada perang tahun 1905, Kerajaan Bone mengalami kekosongan kekuasaan, hingga diaktifkan kembali dengan menunjuk Andi Mappanyukki sebagai *Mangkau* ke-32 pada 1931

kerajaan yang sebelumnya menjadi rampasan perang. Tentu saja, pengembalian *arajang* tidak cukup mengembalikan kewibawaan istana tanpa seorang raja yang berkuasa. Nah, konflik kembali mengerucut pada dua elite, yang diwakili oleh Andi Mappanyukki dan La Pabbenteng. Andi Mappanyukki memiliki peluang lebih besar untuk menduduki tahta, dengan dukungan dominan dari pihak dewan hadat (Ade Pitu). Sementara, La Pabbenteng adalah *anak pattola* dari raja ke 30, tak cukup mendapatkan suara dari elite istana.

Akhirnya, Andi Mappanyukki berhasil mendapatkan dukungan mayoritas dan dilantik menjadi raja ke-32. Situasi yang membuat La Pabbenteng berada pada posisi yang rentan. Sebuah kasus pembunuhan yang menyeret La Pabbenteng ke 'meja pengadilan' dan dianggap bersalah oleh raja. Demi menghindari sanksi sosial, La Pabbenteng akhirnya meninggalkan tanah Bone menuju Buton. Kepergian La Pabbenteng hanya menunda perseteruannya dengan Andi Mappanyukki.

### **Milisi dan Kelompok Perampok; Teror dan Lari Beta**

Bagi elite, krisis melahirkan kelompok potensial yang bersaing merebut ruang. Bagi warga biasa, krisis telah mengakumulasi sejumlah ketakutan. 'Lari beta' (mengungsi) adalah pilihan terakhir warga untuk mencari tempat aman selama periode konflik. Penduduk menjalani *lari beta* sejak hari-hari terakhir kekalahan Jepang. Mekanisme pertahanan terakhir ini setidaknya menghindarkan penduduk dari peluru nyasar atau ledakan bom. Meski demikian, di tempat pelarian, keamanan tidak benar-benar berhasil mereka dapatkan. Pencurian dan penjarahan adalah ancaman lain yang sewaktu-waktu muncul di tengah pelarian.

Kisah Becce Tang, menuturkan bagaimana ia dan keluarganya yang tinggal di Watampone, bersama warga sekampung berjalan kaki menuju Passempé, sebuah desa dekat gunung, sekita tujuh kilo meter di barat kota. Pelarian warga ke tempat yang dianggap aman menunjukkan bahwa

kondisi keamanan di kota turut mempengaruhi kondisi perekonomian maupun interaksi sosial. Krisis ekonomi yang ditinggalkan oleh Jepang masih belum pulih. Untuk menyiasati kelangkaan pangan, penduduk melakukan diversitas olahan makanan yang disebut *pule*, makanan beras yang dicampur dengan bahan bulir jagung, nangka, hingga bonggol pisang (Subarman, 2017).

Milisi, gerombolan pengacau, dan kelompok kiri<sup>7</sup> adalah subkelompok yang juga terlibat dalam perebutan ruang. Milisi yang diidentikkan dengan pemuda pejuang kerap melakukan serangan sporadis pada pos-pos penjaga yang di dalamnya adalah tentara sekutu dan NICA. Sementara, gerombolan pengacau lebih sering menunjukkan diri sebagai kelompok perampok saat melakukan penjarahan maupun pencurian ternak. Laporan pencurian sepanjang tahun di era revolusi, makin meningkat seiring menguatnya isu pendeklarasian NIT.

Sementara, di dalam tubuh NICA, ada pasukan Australia pemegang otoritas yang memegang kontrol pasukan juga mendikte pemerintahan sipil. Bahkan di dalam dokumen *Proklamasi Marfoce* yang bersifat rahasia tertanggal 29 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Brigjend F.O. Chilton, menerangkan sejumlah kewenangan tentara Australia (sekutu) sebagai pihak yang ditunjuk menjalankan pemerintahan sipil di Sulawesi:

1. Tentara Australia bertanggungjawab tentang keamanan
2. NICA adalah integral dari komando Tentara Australia
3. Semua pasukan Australia diperintahkan untuk memberi pengamanan kepada NICA di dalam menjalankan Pemerintahan Sipil di Sulawesi (La hade, 1983:373).

Perebutan pemegang otoritas yang melibatkan tentara sekutu, kelompok milisi, pihak pemerintah kerajaan, anggota KNIL,

<sup>7</sup>Pada Januari 1949, sebuah surat yang diteken oleh Arumpone yang isinya tentang kekuatiran terhadap gerakan kiri. Tanggapan Arumpone merupakan balasan atas keinginan pemerintah pusat untuk membentuk Dewan Landschap Bone 1922-1959 No. 668, 661)

NICA/Sekutu, juga kerap mendapat gangguan gerombolan pengacau, menunjukkan konflik yang heterogen. NICA/Sekutu menemukan kenyataan revolusi sedang bekerja di daerah, mereka tak bisa dengan tenang kembali ingin menunjukkan kekuasaan. Mereka berperang dengan sejumlah milisi, pejuang dari kelompok muda, kelompok militer, serta berusaha mengantisipasi serangan sporadis dari subkelompok non-afiliasi yang kerap membuat kekacauan dengan menjarah sejumlah fasilitas umum juga merampok rumah-rumah warga. Perang dan tindakan kriminal makin sulit dibedakan, tetapi instabilitas sosial adalah harga yang harus dibayar, tentu saja.

### **Kontestasi Kuasa dan Instabilitas Sosial**

Situasi setelah pengakuan kedaulatan tak serta merta menjadi kondusif. Tak ada batasan yang pasti mengenai warga sipil dengan milisi atau kelompok bersenjata. Kekacauan yang terjadi lalu direspon tak seragam oleh pemegang otoritas. Beberapa kasus penahanan dilakukan dengan sangkaan memiliki hubungan dengan aktivitas gerilya, ada pula yang ditahan karena kasus kriminal biasa seperti pencurian juga penganiayaan, atau kepemilikan senjata. Sementara, kepemilikan senjata tak mampu dikontrol, padahal senjata adalah salah satu prasyarat bagi kelompok tertentu untuk menunjukkan otoritasnya. Beberapa orang ditangkap karena dihubungkan dengan gerakan Andi Aziz atau menjadi mata-mata Westerling. Namun secara umum, tidak ada alasan yang secara tegas untuk dilakukannya penangkapan (Arsip La Hade, No, 109).

Sementara di daerah pelosok, situasi di luar kendali para pemegang otoritas. Akhir Juli 1947, wilayah Tellulimpoe dan beberapa wilayah pegunungan barat lainnya, di puncak-puncak gunung, aparat militer dan pemerintah sama sekali tak mampu menjangkau wilayah hunian penduduk yang kerap diserang oleh gerombolan. Beberapa kampung yang sengaja ditinggalkan telah dibakar habis. Pembakaran itu dilakukan untuk mengakhiri teror para perampok yang terjadi justru dari kampung-kampung, namun

tindakan itu juga menimbulkan teror baru. Para penduduk gunung itu lalu sibuk membangun kampung yang baru di daerah yang lebih rendah. Meski pembakaran dilakukan dengan dalih untuk program reboisasi, namun tetap saja tak mampu menutupi lemahnya dukungan keamanan. Membakar kampung adalah cara praktis memutus teror, tapi api tak mampu memilah siapa dan apa yang tak seharusnya ia bakar.

Pembakaran kampung menimbulkan kekuatiran baru. Lalu, orang memberikan pertimbangan kepada residen agar bermusyawarah dengan pemerintah *Zelfbestuur* dan membuat keputusan, untuk tidak menerima alasan reboisasi. Warga mendesak agar kampung-kampung yang telah dibakar agar dilakukan pengawasan terutama di ladang-ladang, di lereng yang terjal. Menurut Hoek, Kepala Kehutanan NIT, reboisasi itu tetap menjadi poin penting untuk dilaporkan, bahwa program semacam itu akan menghemat biaya pelestarian hutan hingga berjuta-juta, terutama bagi NIT yang baru berdiri.<sup>8</sup> Tampaknya, Hoek masih berupaya memberikan laporan positif di akhir masa jabatannya, untuk mendukung nafas panjang pemerintahan NIT.

Jika di pelosok situasi jauh dari jangkauan aparat militer, maka di kota, konflik muncul dalam banyak bentuk. Hingga Mei 1950, penangkapan masih banyak dilakukan. Banyaknya tawanan oleh Angkatan Perang sukar ditentukan, karena keadaan setempat sukar juga diperoleh keterangan yang memadai. Penangkapan tawanan tidak hanya dilakukan oleh pihak CPM, tetapi juga dilakukan oleh pihak kesatuan. Bahkan kelompok kecil kesatuan (regu dan staf) juga kerap melakukan penangkapan dan mempunyai tawanan di tempat (Arsip, La Hade No. 109). Situasi ini menunjukkan betapa kehidupan warga masih belum kondusif. Perebutan ruang dan kuasa masih belum berakhir. Implikasi yang paling nyata tentu saja adalah kerugian warga sipil. Aktivitas sehari-hari, ke pasar atau

ke sekolah, belum bisa dikatakan normal. Selain itu, kontestasi kuasa di kalangan elite militer maupun kesatuan pemuda, sewaktu-waktu dapat menyebabkan terjadinya benturan fisik, perang terbuka.

Perebutan otoritas menunjukkan kontestasi kuasa masih sangat kuat. Kondisi ini menyebabkan terjadinya standar ganda, atau penetapan hukum sepihak oleh pemegang otoritas (senjata). Kasus salah tangkap atau tawanan tanpa kasus yang jelas, menunjukkan situasi gamang itu. Banyak tahanan terpaksa dilepaskan karena tidak cukup bukti untuk menjeratnya, atau kapasitas tahanan yang tak lagi memadai. Instabilitas sosial melengkapi krisis.

Pada umumnya, mereka yang dilepaskan diberi surat tanda lepas dari pihak yang menahannya. Kalau yang menahan bukan dari CPM maka surat tanda lepas ini dilegalisir oleh PM di tempat. Kemudian orang itu disuruh pulang, adakalanya dengan tidak ada permintaan atau perjanjian dari atau dengan pihak yang menahan, ada juga tahanan yang diberi keterangan sewaktu-waktu dibutuhkan harus menghadap, semacam tahanan kota yang dikenakan wajib lapor (Arsip, La Hade, No. 109).

Kebanyakan dari tawanan itu tinggal di lingkungan satu *afdeeling* saja walaupun jaraknya 100 km. Tetapi, banyak juga yang ditawan (berasal) dari *Afdeeling* Buton Laiwui sedang ia dilepaskan di Palopo atau di Watampone. Banyak di antara tawanan tidak pernah '*diverhoor*' kemudian dilepaskan. Karena itu, timbul pertanyaan:

- 1) Atas dasar apa penangkapan dilakukan oleh TNI?
- 2) Apakah alat2 negara kita sendiri tidak lebih buruk dari alat2 pemerintah kolonial dulu?
- 3) Apakah Negara kita (RI) ini berdasarkan betul hukum juga dalam praktik? (*uitvoering*) (Arsip La Hade, No. 109)

Pertanyaan di atas timbul karena, banyak tawanan mendapatkan kekerasan fisik

<sup>8</sup>Nota serah terima dari Kepala Kehutanan Ir. M. Hoek (Pengelola Wilayah Kerja Celebes-Barat yang turun jabatan periode 1946-Agustus 1947)

berupa pemukulan sebelum ditanya, alih-alih mengharapkan keadilan di depan meja hijau. Sedangkan pada saat penangkapan mereka tidak diberi kesempatan untuk mengambil pakaian dan lain-lain. Selain itu, pemerintah kerap mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani para tahanan. Atas biaya ongkos pulang dan ongkos makan selama mereka di dalam tahanan (ada sampai 5 bulan), pemerintah sipil kerap mengeluh lantaran sudah banyak uang yang dikeluarkan sedang pemasukan keuangan setempat belum memuaskan. Menangani banyak tahanan saat krisis jelas akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas pemerintahan (Arsip, La Hade, No. 109).

Catatan Saleh La Hade menunjukkan bahwa era revolusi menghadirkan situasi rentan. Demikian pula yang terjadi di wilayah Bone saat akhir periode kerajaan. Perebutan otoritas oleh elite, jelas memiliki resonansi terhadap kehidupan sosial secara keseluruhan. Selain itu, gangguan keamanan juga kian marak, baik dari pihak gerombolan, perampok, juga dari oknum pelaku kejahatan kriminal lainnya.

Beberapa bulan setelah pelantikan La Pabenteng menjadi raja Boneke- 33, Negara Indonesia Timur dideklarasikan pada Desember 1946. Kapten Westerling melakukan tindakan pembersihan terhadap para pejuang kemerdekaan. Kehadiran Westerling menjadi bagian tragis dalam kisah upaya pendudukan kembali Belanda di Indonesia. Namun, upaya Raja Bone La Pabbenteng, untuk menghindarkan wilayah kekuasaannya dari kekejaman Westerling.

La Pabbenteng dikenal dekat Belanda, dan menjadi jangkar pertemuan antar raja-raja di Sulawesi. Ironisnya, dengan posisi tersebut, ia juga dianggap berkontribusi besar dalam mencegah Westerling memasuki wilayah teritori Bone untuk melakukan pembersihan kelompok-kelompok ekstrimis. Memang, jika melihat riwayat kepemimpinan, La Pabbenteng yang pernah diangkat menjadi Arung Macege dan menjadi salah seorang anggota Hadat Tujuh, jelas ia adalah seorang tokoh yang berpengaruh dan disegani di lingkungan istana kerajaan, bahkan kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi.

Situasi yang akhirnya terkendali, hingga pada tanggal 30 April 1950, sebagaimana dicatat oleh Abdurrazak:

Situasi dan kondisi demikian tetap dapat dikendalikan hingga pada tanggal 30 April 1950, oleh para pejuang atas persetujuan pemerintah kerajaan Bone, mengeluarkan pernyataan: kesetiaan pemerintah dan rakyat Bone kepada pemerintah Republik Indonesia. (Abdurrazak, 1995:271)

Sebulan berselang, konsolidasi melibatkan massa kembali dilakukan.

Pada tanggal 14 Mei 1950, terjadi rapat raksasa di Kota Watampone yang menghasilkan keputusan: 1) menuntut penghapusan sistem pemerintah kerajaan; 2) menuntut pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komite Nasional Indonesia daerah Bone. Keputusan mana disetujui oleh pemerintah kerajaan Bone. (Abdurrazak, 1995:272).

Tuntutan penghapusan sistem kerajaan makin menguat. Penyesuaian struktur baru pemerintahan tampaknya cukup hati-hati untuk menghindari gesekan. Pada tanggal 17 Mei 1950, terbentuklah panitia pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah Bone. Sebagai hasil kerja panitia dimaksud adalah berhasilnya menyusun komposisi keanggotaan Komite Nasional Indonesia Daerah Bone, yang terdiri dari unsur partai politik, ormas, wakil-wakil distrik, dan wakil golongan minoritas Arab-Tionghoa, yang keseluruhannya berjumlah 53 orang. Setelah terbentuknya Komite Nasional Indonesia Daerah Bone dan pelantikan anggota-anggotanya pada 21 Juni 1950, terjadilah peristiwa penyerahan kekuasaan dari pemerintah Kerajaan Bone kepada Komite Nasional Indonesia Daerah Bone beberapa hari kemudian, Raja Bone dan Dewa Ade Pitue sebagai penguasa bidang eksekutif mengakhiri masa baktinya (Abdurrazak, 1995:272).

Pada 27 Juni 1950 sidang pertama Komite Nasional Indonesia Daerah Bone yang dipimpin oleh ketuanya (Sugito) menghasilkan keputusan:

- Mempersiapkan pemilihan anggota Dewan Pemerintah Daerah Bone untuk



mengisi kekosongan setelah Dewan Ade Pitue Kerajaan Bone mengakhiri masa jabatannya

- Mengusulkan penggantian wakil daerah Bone pada Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sulawesi Selatan
- Mendesak kepada pemerintah, agar daerah Bone dijadikan daerah otonom
- Mendesak pemerintah agar segera diadakan sekrening kepala kampung
- Mendesak kepada pemerintah, agar segera mengisi jabatan kepala distrik yang lowong dengan pejabat sementara/*acting* (Abdulrazak, 1995: 273).

Adapun susunan/komposisi Dewan Pemerintah Daerah Bone yang bertugas di bidang eksekutif adalah: 1) Urusan umum, kesehatan, agama dan pendidikan; 2) Urusan keuangan; 3) Urusan pembangunan dan lalu lintas; 4) Urusan penerangan dan pemuda; dan 5) Urusan sosial dan ekonomi. (Abdulrazak, 1995:273).

### **Raja Terakhir dan Pertaruhan Konsep NIT**

Periode revolusi menghadirkan masa transisi. Perebutan otoritas makin menguat, menghadirkan kelompok elite istana, para milisi, kelompok perampok, dan NICA bersama pihak sekutu. La Pabbenteng dilantik pada September 1946. Sebuah fakta sejarah yang menunjukkan bahwa perjalanan periode kerajaan masih terus berlanjut, setahun setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Sebagai anak patta, La Pabbenteng menyudahi penantian panjang untuk menduduki tahta kerajaan. Anak patta ini dilantik sebagai raja ke-33 menggantikan Andi Mappanyukki. Dua tokoh yang memiliki riwayat perseteruan sejak Kerajaan Bone kembali diaktifkan pada 1931, setelah vakum selama 26 tahun. Di bawah kontrol Belanda, raja bertahta, namun kerajaan lebih berfungsi sebagai pemungut pajak. Mungkin wibawa kerajaan dapat dipulihkan hanya dengan mahkota, tetapi tidak dengan instabilitas sosial dan perbaikan perekonomian.

Pengangkatan La Pabbenteng menunjukkan bahwa Belanda, sebagaimana di Jawa

yang menganggap elite tradisional (priyayi) memiliki peran sebagai benteng pertahanan (Sutherland, 1983:224). Seorang raja tidak hanya mewakili kelompok elite tradisional, namun juga memiliki otoritas yang kuat di tengah masyarakat. Ketika NIT digelindingkan sebagai sebuah konsep negara yang menganut sistem otonom, maka elite tradisional melihat peluang itu penting untuk menjaga supremasi. Konsep otonom terdengar lebih akrab dengan kepentingan penguasa lokal, yang tentu saja berharap tetap mempertahankan kekuasaannya. Fakta bahwa raja-raja lokal mendukung ide dan keberadaan NIT, sulit membantah pragmatisme kekuasaan saat itu.

Meskipun demikian, mendukung NIT jelas bukan pilihan terbaik, tetapi seorang raja harus menentukan sikap tegas. Keberadaan NIT setelah revolusi kemerdekaan mungkin lebih tepat disebut sebagai pertaruhan: mendukung ide Belanda atau sebuah tuntutan otonomi luas, adalah indikasi umum, untuk tidak menyebutnya hanya sebuah episode yang harus dilalui.

Jika NIT adalah keniscayaan revolusi, tentu saja kontestasi elite adalah bagian yang tak terpisahkan. Tentu akan melahirkan kisah berbeda, jika para elite lokal tak mendapatkan panggung dalam kelompok pro-federalis. Sementara, komposisi elite dalam struktur republik belum mampu diakomodir di daerah. Bahkan, kelompok militer yang memiliki riwayat friksi profesional *versus* feodalis, bermuara pada menguatnya kelompok DI/TII di bawah pimpinan Kahar Muzakkar, gerakan kontra-republik yang selanjutnya memperpanjang periode revolusi dan perang saudara yang tak terhindarkan di Sulawesi. Situasi yang mungkin akan lebih pelik lagi, jika elite pro-federalis tak 'menciptakan' wadah NIT.

Dilantiknya raja terakhir La Pabbenteng, menunjukkan Kerajaan Bone masih memerlukan waktu untuk melalui periode revolusi fisik. Memang tak ada (atau belum ada) bukti yang bisa meyakinkan kita bahwa raja terakhir adalah bagian dari skenario untuk menyokong NIT.

Proses peralihan sistem kerajaan menyatu ke dalam negara Republik Indonesia, berdasarkan

tulisan Abdurrazak, yang kerap menjadi rujukan peneliti sejarah Bone, terkesan lancar tanpa kendala berarti. Sayangnya, Abdurrazak mengabaikan peristiwa saat La Pabbenteng dipecat sebagai raja Bone, yang membuatnya harus menanggalkan jabatannya sebagai ketua dan anggota Hadat Tinggi Sulawesi<sup>9</sup>. La Pabbenteng resmi dipecat pada 1 Juni 1950, artinya ia turun tahta bertepatan dengan proses peleburan Kerajaan Bone ke dalam Republik Indonesia (Arsip Bone No. 852).

Sementara, di luar ibukota kerajaan, situasi tidak benar-benar terkendali. Para pengikut La Pabbenteng tampaknya belum bisa menerima pemecatan yang menimpa pemimpin mereka. Beredar surat ancaman yang isinya mengaitkan maraknya ancaman pembunuhan dan perampokan yang dilakukan oleh kelompok gerilyawan (Arsip Bone No. 849).

Pada tahun 50-an, RIS bubar, tapi saat itu, revolusi di Sulawesi mungkin baru memasuki fase kritis. Darul Islam yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar mulai menebar ancaman, setelah mereka menarik diri dari kesatuan tentara dan masuk ke hutan. Batas kota dengan kampung adalah ditarik. Kota jadi wilayah kekuasaan tentara, sementara tentara Kahar menguasai kampung.

Pemulangan tahanan politik anggota CTN (Corps Tjadian Nasional) di awal tahun 1951 ke kampung masing-masing, tak berjalan sesuai rencana. Anggota CTN “Brigade Hasanuddin”, yang berada di bawah komando Kahar Muzakkar masih melakukan manuver. Sebuah pengumuman yang dikeluarkan oleh Markas Besar CTN Brigade Hasanuddin yang ditandatangani oleh Kahar Muzakkar, secara eksplisit menunjukkan dua sikap yang paradoks: di satu sisi ingin memenuhi panggilan Menteri RI untuk ke luar dari hutan dan bergabung dengan rayon-rayon, tapi tetap menyerukan sikap menjaga jarak dengan pasukan TNI. Kahar menyebut ancaman kepada siapapun yang

menjadi mata-mata TNI. Bagi Kahar, kaum gerilya, bagaimanapun tetap disebutnya sebagai ‘Pantjasila Sedjati’, cukup punya ‘mata dan telinga’ untuk memahami siapa musuh mereka yang sebenarnya.<sup>10</sup>

Mengingat perubahan yang terjadi begitu cepat, pemegang otoritas membutuhkan legitimasi yang kuat untuk mengendalikan situasi. Meski demikian, masih tetap muncul pertanyaan yang mengusik: apakah periode Andi Mappanyukki memang sudah berakhir? Ataupun pengangkatan La Pabbenteng adalah bagian dari kompensasi yang harus dibayar demi memberi jalan bagi Belanda untuk kembali ke tanah Bugis? Adalah dua pertanyaan yang masih memerlukan sejumlah bukti untuk menemukan jawaban yang tepat.

## PENUTUP

Pihak Kerajaan Bone pada masa revolusi kemerdekaan tetap memegang kendali dan berhasil mengonsolidasi pemimpin-pemimpin lokal. Kesiapan mereka bergabung ke dalam forum yang menyokong berdaan NIT adalah salah satu bukti, setidaknya menunjukkan bahwa Kerajaan Bone sebagai pewaris imperium Bugis masih sangat diperhitungkan oleh penguasa-penguasa lokal. Jika saja Soekarno tidak membacakan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta, mungkin kita masih akan menemukan sejumlah konflik dari sejumlah pemegang otoritas di daerah.

Ada kisah paradoks yang menyertai perjalanan Kerajaan Bone melewati periode revolusi, bahwa dua tokoh sentral Andi Mappanyukki dan La Pabbenteng berdiri berseberangan. Sejarah negara lalu mencatat Andi Mappanyukki sebagai seorang pahlawan nasional, berkat kegigihannya mempertahankan kemerdekaan dan setia kepada konsep negara kesatuan. Sementara, La Pabbenteng, sang raja terakhir, namanya dicatat sebagai salah satu tokoh yang berdiri di barisan NIT, sebuah

<sup>9</sup>Keputusan Presiden NIT, No. 78/Prb/48 tentang Pengangkatan Ketua dari Hadat Tinggi dari Gabungan Selebes Selatan, Andi Pabbenteng Daeng Palewa Sultan Mohammad Idris Alimuddin; Ze;fbestuurder Bone.

<sup>10</sup>Pengumuman Markas Besar CTN “Brigade Hasanuddin” No. 16/P.M./1951, tanggal 1 September 1951

negara *premature* yang gagal ‘digunakan’ oleh pemerintah kerajaan Belanda untuk melakukan rekolonisasi. Meski, tercatat sebagai raja, kisah La Pabbenteng seperti menguap tak berbekas.

Paradoks ini yang kerap kembali hadir pada setiap diskursus tentang bagaimana seharusnya daerah menyikapi revolusi. Kerajaan Bone memiliki sejarah panjang, jauh sebelum konsep negara Indonesia hadir. Dalam perjalanannya, semangat bangkit dari kolonisasi, menjadi variabel penting yang selanjutnya menentukan perjalanan sejarah daerah dan bangsa ini.

Karena itu, yang paling memungkinkan sekarang ini adalah bagaimana menerima kenyataan sejarah itu sebagai bagian yang harus dilalui, alih-alih menyebutnya sebagai dosa sejarah. Sebab, NIT adalah pilihan terbaik untuk tetap mempertahankan supremasi kerajaan, setidaknya untuk melewati masa rentan revolusi. Kita perlu melihat kembali lebih jernih, bagaimana elite mengambil kebijakan, faktor pendorong, juga sejumlah implikasinya, agar tidak terjebak ke dalam narasi besar yang justru menyembunyikan banyak peristiwa penting.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

- Arsip Statis Inventaris Pemda Bone 1922-1959 No. Reg. 668, 661, 849, 852, 924, 953
- Arsip Inventaris Koleksi Pribadi Muhammad Saleh La Hade (1937-1973) No. Reg. 109
- Keputusan Presiden Indonesia Timur No,78/Prb/48 Tentang Pengangkatan Ketua Hadat Tinggi dari Gabungan Selebes Selatan.
- Nota Serah Terima dari Kepala Kehutanan Ir. M. Hoek (Pengelola Wilayah Kerja Celebes-Barat yang turun jabatan periode 1946-Agustus 1947)
- Notulen rapat pemerintah keradjaan Bone pada 30 November 1949, dihadiri pejabat di antaranya: Maddusila, Makkedang Tana; Sulolipu, Tomarilaleng; Patarai, Aru Matjege; Mandapi, Aru Pontjeng; Paranrengi, Aru Tibotjong; Passalo, Aru Ta'; Pasinringi, Aru Tanete Riattang dan para Salewatang.

### Buku

- Anak Agung Gde Agung. 1985. *Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Anderson Bennedict. 2018. *Revoloesi Pemoeda; Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Bemmelen, Sita van dan Remco Raben (Peny.) 2011. *Antara daerah dan Negara: Indonesia tahun 1950-an, Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa*. KITLV-Jakarta - NIOD - Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Bloembergen, Marieke. 2009. *Polisi Zaman Hindia Belanda; Dari Kepedulian dan Ketakutan*. Jakarta: Kompas, bekerjasama dengan KITLV-Jakarta.
- Chairan, Tamin dkk. 2011. *Bunga Rampai Sastra Bugis, Bacaan Sejarah Sulawesi Selatan* (Transliterasi dan Terjemahan). Jakarta: Perpustakaan Nasional dan Balai Pustaka
- Abdurrazak, Daeng Patunru, dkk. 1995. *Sejarah Bone*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Mappangara, Suriadi, 2008. *SULSEL, Dimensi Sosial-Budaya, Untuk Pariwisata*. Kerjasama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI dengan Universitas Hasanuddin.
- Oostindie, Gert. 2016. *Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950; Kesaksian Perang pada Sisi Sejarah yang Salah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, KITLV-Jakarta
- Subarman. 2017. *Pule dan Rakkiang; Pengalaman Ketahanan Pangan Petani Bone pada Masa Revolusi (1945-1949)*. Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Sutherland, Heather. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

**Jurnal/ Makalah**

- Asba, A. Rasyid. 2008. “Andi Sultan Daeng Raja Kaum Cendikia, Tokoh Pergerakan Nasional dan Pejuang Kemerdekaan”. Makalah disampaikan dalam Seminar 100 tahun memperingati Kebangkitan Nasional dengan Thema” Mencari Nilai-Nilai Kepahlawanan Sultan Daeng Raja, Seratus Tahun Kebangkitan Nasional Pemda. TKII. Bulukumba. 23 Mei 2008
- Abdullah, Taufik. 2016. *Historiografi dalam Denyut Sejarah Bangsa*. Jurnal Kalam, edisi 8, tahun 2016, hal. 2-28
- Subarman, 2006. *Bone: Dari Kerajaan Hingga Terbentuknya Kotif Watampone*. Makalah. Progam Studi Antropologi Konsentrasi Sejarah Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.